

BAB IV

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELAKUKAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI WILAYAH PERBATASAN

Sebagian besar wilayah perbatasan di NTT (Nusa Tenggara Timur) merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Anggapan di masa lalu, bahwa wilayah perbatasan ini merupakan kawasan angker yang tidak boleh dijamah, serta perlu diawasi secara ketat karena dikhawatirkan akan menjadi tempat persembunyian para pemberontak dan penyelundup telah menjadikan paradigma pembangunan di wilayah perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan (*security approach*) dari pada pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Dampak dari cara pandang itulah yang mengakibatkan wilayah perbatasan NTT menjadi satu daerah perbatasan yang tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan dan pusat-pusat pelayanan pemerintah lainnya yang menyebabkan masyarakatnya menjadi relatif miskin, tertinggal dan terisolir. Dari aspek ekonomi, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat melatarbelakangi maraknya kegiatan-kegiatan ilegal seperti penyelundupan barang-barang kebutuhan pokok secara ilegal, perlintasan orang-orang secara ilegal dan kegiatan ilegal lainnya.

Kebijakan mengenai pembangunan sosial di perbatasan harus menjadi perhatian dari pemerintah, selain kebijakan yang difokuskan pada bidang keamanan. Upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk mengembangkan kawasan perbatasan adalah dengan orientasi pembangunan sosial untuk pengembangan kawasan

perbatasan. Dengan diterapkannya orientasi pembangunan sosial untuk kawasan perbatasan maka diperlukan suatu pengaturan dan membutuhkan keseriusan yang tinggi, mengingat kawasan perbatasan merupakan lokasi spesifik atau beranda yang terdepan yang mewakili citra suatu bangsa, dimana orang dengan mudah keluar masuk wilayah Indonesia. Pembangunan sosial dan percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan harus dilakukan pemerintah dalam menangani masalah di perbatasan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan.¹⁰⁰

Masalah utama dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses penmbangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.¹⁰¹

100 Eddy MT. Sianturi, SSi dan Nafsiah, SP, "Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI", dalam <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?>. Diakses pada 20 Oktober 2011

101 Lincolin, Arsyad, Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta, Cetakan 1, 1999, Hlm 298.

A. Faktor Ketertinggalan Kawasan Perbatasan

Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Lokasinya terpencil atau terisolasi dengan tingkat aksesibilitas rendah, sehingga tingkat mobilitas dan gerak langkah masyarakatnya pun menjadi rendah, terutama antar desa perbatasan dengan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan akibat keterbatasan fasilitas, serta kurang memadainya jumlah tenaga pendidik dan tenaga medis sebagai akibat posisi wilayah yang relatif jauh dari pusat-pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Tingkat kesejahteraan rendah yang ditandai dengan banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal akibat terbatasnya pelayanan dan kesempatan kerja sebagai akibat daya saing produksi rendah.
4. Informasi tentang pemerintah dan pembangunan sangat langka, karena keternencilan lokasi sehingga sulit dijangkau siaran media informasi

B. Landasan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Melakukan Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan

Dalam membangun tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) yang menegaskan pengembangan wilayah perbatasan antarnegara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuan program pengembangan wilayah perbatasan dalam RPJM nasional 2004-2009 ini adalah untuk:

1. Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang di jamin oleh hukum internasional;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi strategis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.¹⁰³

Pergeseran paradigma dalam pengembangan wilayah perbatasan dengan memberikan ruang lebih leluasa pada pendekatan kesejahteraan di atas, juga semakin jelas pada peraturan presiden nomor 39 tahun 2005 tentang Rencana Kerja

103 Op.cit. hlm 14

Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006). Perpres ini menggaris bawahi bahwa pembangunan wilayah perbatasan merupakan prioritas utama untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan program-program antara lain:

1. Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau terkecil terisolir melalui kegiatan : (i) pengarusutamaan Daftar Alokasi Khusus (DAK) untuk wilayah perbatasan, terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi, (ii) penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan untuk telekomunikasi serta listrik pedesaan;
2. Pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan negara;
3. Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan melalui kegiatan: (i) penetapan garis batas negara dan garis batas administratif, (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kepabean, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi dan pertahanan di wilayah perbatasan negara;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara administratif terletak di wilayah perbatasan negara.¹⁰⁴

Meskipun telah tercapai cukup banyak kemajuan dalam penanganan wilayah perbatasan dibandingkan awal pelaksanaan RPJM Nasional, namun perlu diakui bahwa pembangunan di kawasan perbatasan masih dirasakan lamban. Salah satu

¹⁰⁴ Lihat Bappenas RI, *Rencana Induk Penegelolaan Perbatasan Negara, Buku Pertama, Prinsip Dasar, Arah Kebijakan, Strategi Dan Program Pembanguna*, Jakarta, 2005

permasalahan utama dalam penanganan kawasan perbatasan selama empat tahun terakhir adalah belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antar sektor. Ini menyebabkan belum optimalnya upaya pengelolaan kawasan perbatasan. Suatu manajemen pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi, baik dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaannya belum terbangun. Anggaran pembangunan untuk pengembangan kawasan perbatasan juga masih relatif terbatas karena sering terkalahkan oleh prioritas pembangunan lain.

C. Kebijakan Pemerintah RI Dalam Melakukan Pembangunan Sosial di Kawasan Perbatasan

Kebijakan pemerintah RI dalam mengatasi melakukan pembangunan sosial di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste yaitu melalui: aspek pengembangan mealui pengembangan pemukiman dan prasarana wilayah, aspek pengembangan wilayah yaitu melalui peningkatan perekonomian, dan aspek pengembangan wilayah yaitu pengembangan keadaan sosial masyarakat.¹⁰⁵ Pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah tidak hanya dilakukan dengan tindakan militeristik atau dengan menggunakan kekuatan militer, tetapi dapat dilakukan dengan pendekatan ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya. Sehingga fokus keamanan terdapat nilai-nilai baru seperti perlindungan upaya mencegah penyelundupan yang ada di perbatasan. Sesuai dengan kondisi dan permasalahan kawasan perbatasan di NTT, kebijakan pengelolaan bidang ekonomi rakyat terarah pada rangkaian cara dan upaya pemecahan masalah-

¹⁰⁵ "Rencana Induk pengelolaan perbatasan negara: prinsip dasar, arah kebijakan, strategi dan program

masalah yang mendasar yang sedang atau yang akan dihadapi masyarakat. Perwujudan ketahanan ekonomi rakyat adalah demi kepentingan ekonomi yang lebih luas dan jangka panjang. Pengelolaan ekonomi rakyat diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian SDA, lingkungan hidup, penyediaan sarana-prasarana sosial, ekonomi dan keamanan, serta pengembangan kelembagaan pengelola batas negara dan kawasan perbatasan.¹⁰⁶

Wilayah perbatasan merupakan kawasan khusus yang perlu dikelola dan dikembangkan dengan konsep komprehensif untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi. Sebagian besar kawasan perbatasan merupakan kawasan yang tertinggal dengan sarana prasarana sosial ekonomi terbatas. Akibatnya, wilayah perbatasan ini menjadi tidak tersentuh dinamika pembangunan dan masyarakatnya menjadi miskin. Dalam melakukan pembangunan sosial di kawasan perbatasan pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

C.1. Menarik Investor Asing Untuk Kawasan Perbatasan

Para investor asing akan menanamkan usahanya di wilayah perbatasan Belu-Timor Leste karena wilayah tersebut memiliki potensi yang begitu besar di bidang pertambangan, perikanan dan pertanian. Para investor Cina secara khusus datang ke Kupang untuk menjajaki kemungkinan menanamkan modal pada tiga sektor strategis yaitu pertambangan, perikanan dan pertanian, pemerintah kabupaten Belu telah

¹⁰⁶ Yohana. Sariumivati. Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Nusa Tenggara Timur.

memiliki data potensial pertambangan namun belum lengkap dan rinci sehingga dibutuhkan kegiatan lanjutan pendataan potensi tambang melalui pemetaan geologi dalam hal ini pihak pemerintah daerah sedang melakukan kerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk melakukan penelitian tersebut.

Kerjasama tahap pertama telah berlangsung pada juni dan juli 2002 selama 45 hari di tiga kecamatan yakni Kakuluk Mesak, Tasifeto Barat dan Timor Leste ini memiliki sumberdaya alam tambang yang cukup potensial terutama pasir batu (sirtu), batu gamping, lempung, gypsum, marmer, batu setengah permata dengan deposit yang bervariasi. Sasaran utama penelitian pertambangan adalah agar pemerintah memiliki data akurat mengenai potensi dan proporsi bahan tambang, peningkatan nilai tambah, diversifikasi dan konversi serta kelestarian lingkungan. Tujuan dari semua kegiatan penelitian adalah peningkatan penerimaan daerah, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha yang diwujudkan antara lain, melalui kebijakan peningkatan produksi dan penganekaragaman hasil tambang serta mendorong penanaman modal swasta, rendahnya kegiatan pertambangan di wilayah itu disebabkan berbagai permasalahan antara lain, aplikasi dana untuk kegiatan penelitian dan eksplorasi bahan tambang yang belum memadai. Begitu pula, penjajakan investasi usaha pertambangan terhambat dengan rendahnya infrastruktur dan manufaktur pada lokasi-lokasi potensi tambang serta kemampuan sumber daya manusia pengelola usaha pertambangan yang masih rendah.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Lihat Investor Cina Lirik Belu. Dalam www.indonesia.com. Diakses tanggal 22 oktober 2011

C.2. Pengelolaan Industri Rumah Tangga di Kawasan Perbatasan

Pengembangan potensi di bidang industri rumah tangga, komoditi yang diproduksi dari kegiatan industri rumah tangga adalah kain tenun yang dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Usaha pertenunan ini sudah membentuk tiga kelompok tenun dengan jumlah anggota sekitar 20 orang dalam satu kelompok, usaha penenunan itu bergerak secara optimal. Kain tenun yang dihasilkan oleh pengrajin hanya untuk kebutuhan sendiri. Pengrajin belum berpikir untuk memasarkannya. Namun, upaya-upaya dari pihak pemerintah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana cara atau strategi pemasaran yang baik kepada penduduk yang bergerak di bidang usaha tenun agar lebih mampu bersaing lagi. Sebenarnya harga kain tenun dapat ditekan pada harga yang lebih rendah, harus melibatkan modal usaha yang dapat membantu perkembangan industri rumah tangga tersebut, dan disediakan jaringan yang bersifat luas bukan hanya di wilayah tersebut, namun mencakup wilayah lain. Adapun tempat produksi kain tenun hampir menyebar di semua wilayah perbatasan yaitu di Lamaknen, Reihat, Kobalima, Miomafo Barat, Miomafo Timur, Amfoang Utara dan Insana Utara. Hal tersebut bisa menjadi faktor penentu keberhasilan industri rumah tangga.¹⁰⁸

C.3. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kawasan Perbatasan

Permasalahan kawasan perbatasan yang utama adalah keterisolasian yang disebabkan oleh kondisi alam seperti geografi dan topografi dari kawasan tersebut yang menyebabkan sulitnya jangkauan atau rentang kendali dalam rangka pembinaan dari pusat-pusat pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi). Kondisi jalan di wilayah perbatasan NTT saat ini cukup parah. Kondisi ini mengakibatkan transportasi menuju wilayah ini sulit sehingga memakan waktu dan biaya. Selain itu sangat menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan. Dengan pembangunan jalan yang memadai diharapkan akan mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat karena transportasi menjadi lancar yang secara otomatis berpengaruh besar pada kegiatan ekonomi di wilayah ini. Selain itu perlu dibangun jalan dari kawasan perbatasan yang menghubungkan pusat kota atau pusat pemukiman terdekat. Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota atau pemukiman baru di dekat perbatasan. Kondisi infrastruktur jalan yang baik di wilayah perbatasan sangat mendukung kepentingan pertahanan negara karena akan memudahkan TNI melaksanakan operasi perbatasan terutama dalam hal evakuasi, dislokasi pasukan dan logistik.

Artinya pelaksanaan tugas pemerintah dan tugas pembangunan terkendala oleh kondisi kawasan perbatasan yaitu sarana dan prasarana jalan yang belum memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah dengan membangun dan memperluas sarana prasarana jalan dan transportasi.

sehingga dibutuhkan membangun prasarana transportasi seperti pembangunan jalan di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Adapun ruas-ruas jalan yang sudah dibangun dan ditingkatkan kualitas jalannya oleh pemerintah kelalui departemen KIMPRASWIL di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste, yaitu: Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara yang meliputi pembangunan dan peningkatan mutu jalan, Saenam-Oenaek sepanjang 19 km, Oenaek-Noelolo sepanjang 12 km, Nunpo-Saenam sepanjang 12 km, Haumeni Ana-Nanaban sepanjang 6 km, Nainaban-Inbate 6 km, Napan-Bitefa sepanjang 9 km, Kefamenanu-Nunpo sepanjang 13 km, Wini-Kafemenanu sepanjang 63 km, Kefamenanu-Napan sepanjang 24 km, Wini- Maubesi sepanjang 45 km; Perbatasan Kabupaten Belu meliputi peningkatan mutu jalan dari Atambua-Distrik Bobonaro dan Perbatasan Kabupaten Kupang meliputi peningkatan mutu jalan dari Kupang-Citrana.¹⁰⁹

C.4. Pembangunan Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan di Perbatasan

Dalam menjalankan Peraturan Presiden No 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006), pemerintah telah menyiapkan program khusus untuk meningkatkan kualitas di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, upaya yang dilakukan pemerintah adalah membangun sekolah tinggi dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Di Kabupaten Belu telah dibangun Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES),

109 Membangun Kawasan Perbatasan NTT Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung

dengan dibukanya sekolah tinggi ini diharapkan dapat mengantisipasi kerjasama yang dilakukan antara masyarakat Timor Leste dengan Indonesia, dan diharapkan para alumninya dapat membantu masyarakat yang berada di perbatasan. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan petugas medis di perbatasan NTT dapat memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di wilayah perbatasan Timor Leste khususnya Distrik Bobomaro, Covalina dan Oecusse yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara (TTU). Dan juga sebaliknya, petugas medis asal Timor Leste dapat juga memberikan pelayanan kesehatan bersama dengan tenaga medis dari perbatasan NTT di Kabupaten Belu dan TTU. Pada tahun 2002 Dinas Kesehatan telah melakukan kerjasama dengan Timor Leste dalam bidang kesehatan.

Pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah membahas pelayanan kesehatan perbatasan antarnegara demi mencegah penyebaran berbagai penyakit menular dan penyakit lainnya yang membahayakan masyarakat di dua wilayah ini. Adapun upaya lain pemerintah yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertaraf internasional di perbatasan Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dan sudah merekrut 87 siswa dan juga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang masih dalam proses perencanaan dengan luas sekitar 30 hektar. Pemerintah juga mengalokasikan dana kepada 20 sekolah atau lembaga pendidikan di NTT untuk memperoleh dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Besar bantuan kepada 20 sekolah/lembaga pendidikan tersebut bervariasi antara Rp 15 juta sampai

Rp 25 juta. Hal tersebut di tujukan untuk membangun sekolah-sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. 20 sekolah yang mendapat bansos Kemendiknas itu seluruhnya berada di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang serta Kabupaten TTS. Untuk jumlah dan tingkatan sekolah penerima bansos terdiri dari satu kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tiga Taman Kanak-Kanak (TK), tujuh Sekolah Dasar (SD), empat Sekolah Menengah Pertama (SMP), empat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan satu lembaga pendidikan yakni Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (Yupenkris) Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT).¹¹⁰

Pemerintah juga telah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Betun untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di perbatasan namun pembangunan kesehatan masyarakat harus menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman di bidang kesehatan dengan Pemerintah Republika Demokratik Timor Leste. Kerjasama tersebut adalah salah satu upaya untuk mencapai beberapa tujuan di bidang kesehatan. Kerjasama yang dilakukan antara lain adalah untuk melakukan penurunan Tingkat Kematian Ibu (AKI), penanganan penyakit kolera, tuberkolusis, malaria, dan lain-lain. Dengan adanya kerjasama tersebut dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste. Kondisi kesehatan di perbatasan menjadi perhatian serius dalam kerjasama ini.¹¹¹ Ruang lingkup kerjasama yaitu pelayanan kesehatan

110 20 Sekolah di NTT Dapat Bansos. Dalam <http://nttprov.go.id/provntt/index>. Diakses pada 22 Oktober 2011

rumah sakit meliputi sistem rujukan dan sister hospital, di bidang farmasi dan alat kesehatan, pengembangan sumber daya manusia meliputi pendidikan dan pelatihan, di bidang penyakit menular terutama di daerah perbatasan dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi, di bidang kesehatan ibu dan anak meliputi imunisasi dan gizi, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.¹¹²

C.5. Membangun Prasarana Perkotaan dan Pedesaan di Perbatasan

Pembangunan prasarana perkotaan dan pedesaan lebih dititik beratkan pada peningkatan derajat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat perbatasan melalui penyediaan infrastruktur yang berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelayanan sosial. Adapun beberapa prasarana yang telah dibangun yaitu: Pertama, Membangun pasar-pasar rakyat yang ada di perbatasan untuk memenuhi segala macam kebutuhan masyarakat antar kedua negara biasa melakukan interaksi penjualan dan pembelian di pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pasar-pasar yang sudah dibangun di perbatasan antara lain; Kabupaten Belu (Mota'ain, Motamasin, dan Turiskain), dalam tahanan perencanaan yaitu di TTU (Napan) dan Kupang (Naikliu). Kedua, pembangunan terminal di kecamatan khususnya di wilayah yang dilewati jalan nasional. Pemerintah pusat akan membangun terminal bus internasional di lahan seluas empat hektare di perbatasan Kabupaten Timor Tengah

112 Indonesia – Timor Leste Tandatangani Kerja Sama Bidang Kesehatan. Dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses pada 18 Oktober 2011.

Utara (NTT) dan Distrik Oecusse-Timor Leste. Pembangunan terminal internasional bagi para pelintas batas tersebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 24 miliar. Dengan adanya pembangunan terminal di dekat pos lintas batas Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dengan sendirinya akan mempermudah transportasi darat para pelintas yang akan ke Indonesia maupun ke Timor Leste. Sudah ada dua terminal internasional yang dibangun sebelumnya yakni terminal Internasional Kupang dibangun di lahan seluas 3,5 hektare di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima dan terminal Motaain, di perbatasan Kabupaten Belu dan Timor Leste.¹¹³ Pembangunan pasar dan terminal tersebut sudah bisa di gunakan namun belum mencapai hasil yang optimal, dan diharapkan agar sarana dan prasarana itu dapat mempermudah akses kedua negara tersebut.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tahun 2011 mengalokasikan dana tugas pembantuan untuk Kabupaten Belu sebanyak Rp. 9 miliar. Dana ini akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan akses sabuk perbatasan Motaain-Turiskain-Metamauk. Pihak BNPP sudah menggelar lokakarya penyusunan program prioritas pembangunan kawasan perbatasan RI-RDTL tingkat Provinsi NTT untuk regional daratan Timor tanggal 17 Februari 2011, di Bappeda Belu. Kedepan dukungan dana BNPP dan kementerian terkait diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan di kecamatan di kawasan perbatasan yang meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan yang menyambung antar kecamatan perbatasan,

infrastruktur ekonomi, air bersih, listrik perdesaan, perumahan, sekolah dan sarana kesehatan.¹¹⁴

Percepatan pembangunan sarana dan prasarana ketersediaan sarana dan prasarana merupakan pendukung bagi bergulirnya kebijakan wilayah perbatasan. Memperluas ketersediaan sarana dan prasarana dapat berarti memperbanyak sarana dan prasarana maupun meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada. Peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi memerlukan dukungan ketersediaan jaringan listrik, air, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, pasar, dll. Pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti sekolah dan pusat kesehatan mutlak diperlukan, terutama di wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang ekonominya relatif lebih baik dari Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sarana dan prasarana sosial dasar tersebut setidaknya setara atau sama dengan di negara tetangga sehingga dapat mengurangi minat masyarakat perbatasan atau wilayah dalam lainnya yang berniat sekolah atau berobat di negara tetangga.¹¹⁵

114 Belu Dapat Dana Perbatasan Rp 9 M. dalam <http://nttprov.go.id/provntt/index.php>. Diakses pada 20 Oktober 2011

115 Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Di Kawasan Perbatasan Darat Sebagai Pintu Gerbang Aktivitas Ekonomi Dan Perdagangan Dengan Negara Tetangga. Dalam <http://kawasan.bappenas.go.id/>. Diakses pada 20 Oktober 2011.

C.6. Pembangunan Jaringan Penyiaran Untuk Kawasan Perbatasan

Pentingnya wilayah perbatasan bagi suatu negara yaitu untuk memepertahankan kedaulatan negara, pengikat kerjasama antar negara dan sebagai beranda depan sebuah bangsa. Sebagai potensi pengembangan wilayah karena adanya interaksi alamiah aspek ekonomi, sosial dan budaya antar masyarakat RI dengan negara tetangga. Daerah perbatasan merupakan daerah rawan terjadi konflik. Pentingnya jaringan penyiaran di wilayah perbatasan yaitu untuk memberi kesempatan kepada masyarakat Indonesia yang berdomisili di perbatasan supaya lebih menegetahui informasi tentang keadaan di negara sendiri maupun keadaan internasional sendiri. Pengembangan jaringan penyiaran juga dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dengan daerah-daerah lain. Wilayah Indonesia yang berbatasan langsung, seperti provinsi NTT, dengan kondisi penduduk Indonesia dan infrastruktur lebih baik dibandingkan dengan penduduk Timor Leste, di wilayah perbatasan biasanya rentan adanya konflik.

Sesuai amanat undang-undang no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu spektrum frekuensi haruslah dijaga dan dilindungi oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945. Tujuan penyelenggaraan penyiaran yaitu; pertama, memperkuat integrasi nasional. Kedua, membina watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, memajukan kesejahteraan umum.

Kelima, membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera. Keenam,

menumbuhkan industri penyiaran Indonesia (pasal 3). Penyiaran penting bagi pembangunan dan pengembangan intelektual masyarakat yang berdomisili di perbatasan. Kenyataannya bahwa masyarakat cenderung melihat tayangan dari stasiun televisi dari negara tetangga, ketimbang tayangan televisi dari negeri sendiri. Dari tayangan yang disaksikan tentunya banyak informasi yang dapat mempengaruhi opini, sikap dan perilaku masyarakat. Sekitar 80% masyarakat Indonesia yang berada di perbatasan, bergantung pada siapa yang mengarahkannya dan bagaimana mengarahkannya. Harapan setelah diadakannya studi pengembangan jaringan penyiaran untuk wilayah perbatasan, segera diwujudkan pembangunan infrastruktur penyiaran di wilayah perbatasan. kawasan perbatasan bukan menjadi daerah terbelakang, tetapi merupakan serambi etalase negara Indonesia.¹¹⁶

Warga perbatasan terutama yang berada di pedalaman yang selama ini kesulitan untuk mengakses informasi melalui media seperti Televisi Republik Indonesia. Dengan peresmian empat pemancar baru, terutama dua unit pemancar dalam wilayah Kabupaten Belu maka keterisolasian dari aspek informasi dapat teratasi paling kurang untuk sementara melalui melalui TVRI yang memiliki jangkauan luas di seluruh Indonesia. Empat pemancar baru yang akan diresmikan Menkominfo itu adalah TVRI Sesekoe, Betun, Kalabahi dan SoE. Pemancar TVRI Sesekoe dan Betun ada di Kabupaten Belu bagian Barat Nusa Tenggara Timur,

116 *Rancangan Studi Pengembangan Jaringan Penyiaran Untuk Wilayah Perbatasan*. Dalam <http://bakohumas.depkominfo.go.id,index.php.html>. Diakses pada 18 Oktober 2011

sementara pemancar TVRI Kalabahi Kabupaten Alor atau bagian timur NTT, sedangkan pemancar SoE di Kabupaten Timor Tengah Selatan atau bagian selatan NTT. Pemancar TVRI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste terus dibenahi untuk mendapatkan hasil siaran yang lebih sempurna dan menjangkau warga perbatasan yang masih terisolir dari aspek informasi.¹¹⁷

C.7. Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air (SDA)

Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS dalam kaitannya dengan penataan ruang wilayah dan penataan penggunaan tanah dalam rangka otonomi daerah haruslah disesuaikan dengan undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah sebagai berikut: *Pertama*, pengelolaan DAS dilakukan secara terencana dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan kehidupan maupun penghidupan dan menjaga kelestarian lingkungan sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). *Kedua*, pengelolaan DAS dilakukan secara desentralisasi dengan pendekatan DAS sebagai satuan wilayah pengelolaan. *Ketiga*, pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipasi dan konsultasi masyarakat pada tiap tingkat untuk mendorong tumbuhnya komitmen bersama antar pihak yang berkepentingan (stakeholders). *Keempat*, pengelolaan DAS memerlukan partisipasi masyarakat guna mengurangi beban pemerintah dalam pengelolaan DAS. Kegiatan yang diprioritaskan merupakan suatu pilihan yang disesuaikan dengan aspek yang terkait dengan pengelolaan DAS

¹¹⁷ Warga Pedalaman Perbatasan RI-Timor Leste Dambakan Fasilitas. Dalam

dan permasalahan yang menonjol pada DAS yang bersangkutan, misalnya: pengelolaan DAS guna pengembangan sumber daya air ataupun demi pengembangan wilayah.¹¹⁸

Germany Technical Cooperation (GTZ) atau lembaga asal Jerman yang bergerak di bidang lingkungan dan air bersih membantu memfasilitasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Benenain Kabupaten Belu. Salah satu bentuk fasilitas dari lembaga tersebut dilakukan dalam Kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan GTZ serta Pemerintah Kabupaten Belu, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU). Kerjasama tersebut, bertujuan untuk keberlanjutan pengelolaan secara terintegrasi dan terkoordinasi antara Pemprov NTT dan tiga kabupaten yang berada di DAS Benenain. Implementasi kerjasama ini sesuai surat Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, kepada Mrs. Sabine Markert dari GTZ pada September 2010 lalu yang meminta dukungan teknis GTZ soal pengelolaan DAS Benenain, termasuk penanggulangan banjir yang melibatkan lintas kabupaten TTS, TTU dan Belu. Fasilitas ini merupakan bentuk nyata upaya mengisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2008 dengan mengupayakan adanya kerjasama antara daerah yang melibatkan pusat, provinsi dan kabupaten yang memiliki kewenangan dan urusan di DAS Benenain. DAS Benenain merupakan salah satu DAS di Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri dan menjadi salah satu DAS yang menjadi perhatian nasional. Untuk itu, diperlukan pemetaan yang dapat menghindari timbulnya dampak

118 Memperkuat Pendekatan Kolaborati Dalam Pengelolaan DAS. Dalam

negatif bagi masyarakat. Sungai Benenain setiap tahun selalu meluap dan menghancurkan tanaman, ternak dan harta benda penduduk di Kabupaten Belu, wilayah yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Para penduduk tidak bisa menghindari karena banjir selalu datang tiba-tiba dan menerjang pemukiman penduduk, walaupun di daerah itu tidak sedang turun hujan.¹¹⁹

Kebijakan pengelolaan DAS antara lain pembangunan infrastruktur ekonomi yang berorientasi pada program peningkatan kemanfaatan sumber daya air, irigasi dan pembangunan lingkungan hidup dengan ruang lingkupnya terarah pada program perlindungan dan rehabilitasi sumber air. Target kinerja Dinas PU bidang sumber daya air/irigasi berupa perencanaan pembangunan 52 buah embung kecil. Pembangunan embung kecil 31 buah, embung irigasi 2 buah, jaringan irigasi 17 buah, pengamanan banjir 900 meter, rehabilitasi jaringan irigasi 23 buah, sumur JIAT 8 kegiatan. Selain itu kegiatan air tanah 60 lokasi, pengendalian banjir 8.200 meter, pantai 692 meter, air baku 40 lokasi, sungai 5 buah serta 3 TSA hidrologi. Arah kebijakan Dinas PU bidang SDA, yakni penanganan sumber daya air untuk mendukung kawasan perbatasan sebagai beranda depan/pintu gerbang internasional, juga penanganan SDA di daerah rawan bencana serta akibat kerusakan sosial serta penanganan SDA di daerah terisolasi dan pulau kecil/terpencil. Selain itu, peningkatan pemanfaatan SDA mendukung ketahanan pangan, peningkatan manajemen sumber daya air dan penyediaan kebutuhan air baku untuk perumahan,

¹¹⁹ Lihat *Wagub Ntt: Gtz Fasilitasi Pengelolaan Das Terpadu*. <http://nttprov.go.id/provntt/index.php>. Diakses pada 20 Oktober 2011

industri dan pariwisata serta pengamanan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air dan penyebaran Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) penyelenggaraan sumber daya air.¹²⁰

C.8. Pembangunan Perumahan Untuk Pengungsi Eks Timor Timur

Pemerintah akan membangun 14.666 rumah dan membuka lapangan kerja bagi penduduk eks pengungsi Timor Timur yang berada disekitar perbatasan NTT dengan Timor Leste. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam penuntasan masalah kejelasan nasib sekitar 9.700 kepala keluarga eks warga Timor-Timur yang hingga kini masih tekatung-katung nasibnya. Pada saat ini pemerintah sudah membangun 5.000 rumah di daerah perbatasan, dan direncanakan akan dibangun 3.000 rumah lagi dengan menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Berdasarkan data yang dimiliki, saat ini ada 9.762 kepala keluarga eks warga Timor Timur yang masih berada di kamp pengungsian. Pemerintah berencana akan membangun perumahan, tidak hanya bagi pengungsi eks Timor Timur, tetapi juga bagi warga NTT yang bermukim di sekitar perbatasan. Dengan waktu pembangunan tiga tahun dan seluruhnya akan berjumlah 14.666 rumah. Pemerintah juga akan membuka lahan di sekitar perbatasan untuk di bangun lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan tanaman jarak untuk biofuel. Pembukaan lahan itu sebagai

¹²⁰ Lihat *Mendorong Percepatan Pembangunan NTT*. www.poskupang.com. Diakses pada 20 Oktober 2011

upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di sekitar perbatasan yang sejak lama hidup di bawah garis kemiskinan.¹²¹

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) juga mengalokasikan dana sebesar Rp 1 triliun untuk mendanai pembangunan 29.992 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau warga miskin di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ribuan rumah yang akan dibangun dibagi dalam program perumahan swadaya dan pembangunan rumah khusus. Untuk rumah swadaya berjumlah 20.230 unit, antara lain rumah baru swadaya sebanyak 6.070 unit dan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 14.160 unit. Sedangkan rumah khusus berjumlah 9.762 unit, dibagi untuk warga eks pengungsi Timor Timur yang masih bermukim di kamp pengungsian sebanyak 4.762 unit dan warga lokal 5.000 unit. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara warga eks pengungsi Timor Timur dan warga lokal. Dalam program pembangunan rumah swadaya, pemerintah tidak membangun rumah baru, tapi merenovasi rumah warga pengungsi Timtim. Berdasarkan laporan, dari 20.230 unit rumah swadaya, sebanyak 6.070 unit telah ditempati oleh warga eks Timtim dalam kondisi rusak berat. Sedangkan sisanya, 14.160 unit, dalam kondisi rusak ringan.¹²²

121 Pengungsi eks timtim akan dibangun 14 ribu rumah. Dalam www.menkokesra.go.id. Diakses pada 20 Oktober 2011

122 R. ... 20.000 Rumah untuk Warga Miskin NTT dalam www.tempointeraktif.com. Diakses

D. Kendala Dalam Melakukan Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan

Dalam upayanya dalam melakukan pembangunan sosial di wilayah perbatasan, Pemerintah Indonesia mengalami sejumlah kendala dalam merealisasikan kebijakan pembangunan sosial di kawasan perbatasan, diantaranya: Lokasi yang terpencil/ terisolasi dengan tingkat mobilitas dan gerak langkah masyarakatnya pun menjadi rendah, terutama antar desa perbatasan dengan pusat kegiatan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan; Sumber daya lahan yang tidak subur sehingga membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk mengelolah lahan tersebut, sehingga masyarakat hanya mengharapkan lahan tadah hujan; Penyebaran penduduk yang tidak rata dan terpencar-pencar, terutama di daerah perbatasan, pedalaman dan wilayah bagian tengah menyulitkan pembinaan langsung dari pemerintah; Belum adanya harmonisasi kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah, serta NGO (Non Government Organisation) dan masyarakat lokal; Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan akibat keterbatasan fasilitas, serta kurang memadainya jumlah tenaga pendidik dan tenaga medis sebagai akibat posisi wilayah yang relative jauh dari pusat-pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; Informasi tentang pemerintah dan pembangunan sangat langka, karena keterpencilan lokasi, sehingga sulit di jangkau siaran media informasi nasional, sebaliknya malah lebih mudah menjangkau siaran dari negara tetangga.

Perubahan paradigma dari pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan secara umum masih sebatas pada dominasi tataran wacana. Di perbatasan Indonesia-

Timor Leste, pendekatan keamanan kenyataannya lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesejahteraan. Ini dapat dilihat, antara lain dari cara-cara TNI mengelola atau manajemen perbatasan Indonesia-Timor Leste. Dalam kebiasaan yang berlaku dalam sistem internasional, pengelolaan tempat lintas perbatasan menjadi tanggung jawab petugas Imigrasi dan Bea Cukai. Sebagai akibat pengutamaan pada pendekatan keamanan ini, sebagian besar wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste di Provinsi NTT menjadi tidak tersentuh dari dinamika pembangunan, sehingga sebagian besar wilayah perbatasan tersebut masih merupakan daerah terisolasi dan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial-ekonomi masih rendah. Hingga saat ini, wilayah perbatasan kedua negara masih menghadapi berbagai permasalahan yang tidak sederhana, kompleks dan berdimensi multi-aspek. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Provinsi NTT di wilayah perbatasan adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sangat minim. Salah satu indikasi kuat dari kondisi ini dapat dilihat dari Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) dan tingkat Pendapatan Domestik Bruto Masyarakat (PDRB).¹²³

Selain itu rendahnya jumlah dan kualitas kesejahteraan penduduk dengan penyebaran yang tidak merata dibandingkan dengan luas wilayah dan garis perbatasan yang panjang, yang berimplikasi pada kegiatan pelintas batas yang ilegal. Tingkat pelayanan prasarana yang masih sangat terbatas, seperti sistem perhubungan dan telekomunikasi, pelayanan listrik dan air bersih, serta fasilitas lainnya seperti

123 Op.cit. hlm 17

kesehatan, pendidikan, dan pasar, sehingga penduduk daerah perbatasan masih hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Keterbatasan sumber pendanaan, dimana pembangunan daerah perbatasan kurang diberikan prioritas dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga semakin memperlebar tingkat kesenjangan antar daerah.¹²⁴

Selain itu potensi sumber daya alam yang tersedia di kawasan perbatasan NTT pada umumnya tidak terlalu besar mengingat kondisi lahan di sepanjang perbatasan wilayah ini tergolong kurang baik bagi pengembangan pertanian sedangkan hutan di sepanjang perbatasan bukan merupakan hutan produksi atau konversi serta hutan lindung atau taman nasional yang perlu dilindungi. Sementara kondisi ekonomi masyarakat di sepanjang perbatasan masih tergolong rendah seperti ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat kesejahteraan mereka jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.¹²⁵

124 Strategi Dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Juli 2002